



Educational Rights in Supporting Student Creativity

Hak Pendidikan dalam Menunjang Kreativitas Siswa

Muhammad Rezki Aditya Perdana (*)

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Jalan Semolowaru 45
Surabaya

Zeha Dwanty El Rachma

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Jalan Semolowaru 45
Surabaya

Erika Sabrina

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Jalan Semolowaru 45
Surabaya

Tomy Michael

Penerbit R.A.De.Rozarie
Jalan Ikan Lumba-Lumba 40
Surabaya

Abstract

The research objective is to determine what factors make the cost of education in Indonesia increase, optimization in terms of facilities in each school and the suitability of funds issued from the government is optimal for each educational institution. The research method uses empirical legal research methods. Empirical legal research is a law that is conceptualized as an empirical symptom of the extent to which it carries out its duties, principal, and functions in its implementation or reality in society. One of the significant forms of funding for basic education from the State Budget (APBN) funding source is BOS funds. To start the budget, several things are carried out starting from budget planning, budget implementation, education financial administration, monitoring of the education budget.

Keywords: *education, budget, funds*

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat biaya pendidikan di Indonesia bertambah banyak, optimalisasi dalam hal fasilitas di setiap sekolah dan kesesuaian dana yang dikeluarkan dari pemerintah sudah optimal untuk setiap instansi pendidikan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang sejauh mana menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya dalam pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat. Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dana BOS. Untuk memulai anggaran tersebut dilakukan beberapa hal dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan pendidikan, pengawasan anggaran pendidikan.

Kata kunci: *pendidikan, anggaran, dana*

(*) Corresponding Author: rezkiaditya363@gmail.com

PENDAHULUAN

Bantuan langsung dari pemerintah untuk terkait pembangunan sering kali terhambat dan mengakibatkan tidak berkembangnya pelaksanaan pendidikan di suatu tempat. Hal demikian sebetulnya bertentangan dengan kriteria evaluasi seperti efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan (Akbar, 2016). Ketika pertentangan itu muncul maka mengakibatkan

berbagai permasalahan hukum seperti penyampaian ilmu kepada siswa yang tidak merata, penolakan dari masyarakat akan kualitas sekolah dan adanya diskriminasi antar sekolah. Sebenarnya haruslah dana bantuan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu dimanfaatkan semaksimal dan sebaik mungkin juga dikelola demi kemajuan dan keindahan sekolah tanpa ada campur tangan dari pihak lain atau oknum lain karena apabila dana yang diberikan dari pemerintah setempat itu digunakan tidak pada porsinya atau tidak pada haknya maka itu akan berdampak kepada perkembangan instansi pendidikan tersebut. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan terus, baik secara konvensional maupun inovatif, dan lebih terfokus lagi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah agar mutu pendidikan meningkat pada setiap jenis dan jenjang pendidikan (Barlian, 2016).

Mengacu Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bisa disimpulkan bahwa pemerintah atas dasar UUD NRI 1945 tersebut mempunyai beberapa pemikiran visi sekaligus misi meliputi:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Novitasari, 2020).

Dengan demikian kualitas pendidikan juga tergantung akan lancar atau tidaknya suatu dana yang diterima oleh sekolah.

Di dalam penelitian ini, membandingkan 4 (empat) penelitian sejenis yaitu pertama dikatakan bahwa kualitas proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja guru. Untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan proses pembelajaran, diperlukan perhatian dari penanggung jawab sistem pendidikan secara terus menerus. Pelaksanaan supervisi dapat dilakukan melalui teknik 1) Kunjungan kelas, 2) Kunjungan sekolah, 3) Ujian dadakan, 4) Konferensi kasus, 5) Observasi Dokumen, 6) Wawancara, 7) Angket, 8) Laporan (Maralih, 2014). Penelitian kedua menitikberatkan pada pandemi Covid-19 yang dijadikan sebagai penghambat. Namun temuannya mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh menambah hambatan bagi para siswa yang sudah sulit untuk mengakses pendidikan, maka itu diversifikasi media penyampaian selain internet perlu dipertimbangkan. Opsinya bisa berupa program radio atau menggunakan layanan pos untuk daerah-daerah dengan konektivitas rendah. Pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Selain menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ada, dinas pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan panduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya, guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh. Panduan semacam itu juga sebaiknya tidak melupakan sekolah-sekolah komunitas swasta. Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh yang lebih baik di seluruh wilayah. Upaya tersebut membutuhkan strategi dan supervisi penggunaan BOS, meningkatkan kapasitas para kepala sekolah dan mengizinkan mereka untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas di sekolah, serta memperlengkapi guru dengan keterampilan teknis dan non-teknis untuk pembelajaran jarak jauh (Azzahra, 2020). Penelitian ketiga penetapan standar biaya pendidikan adalah suatu kriteria untuk mengukur keseluruhan pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara efisien dan efektif (Atmaja et al., 2016). Penelitian keempat yaitu faktor keterbatasan luas lahan sekolah yang tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/olahraga.

LITERATUS is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to social impact and cultural studies. It is hoped that LITERATUS can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

Our focus:
Social and Culture

Our Scope:
Humanities, Education, Management, History, Economics, Linguistics, Literature, Religion, Politics, Sociology, Anthropology, and others.



Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, pihak madrasah mengajukan proposal untuk menerima bantuan tetapi tidak semua proposal yang diajukan dari pihak madrasah mendapatkan hasil yang diinginkan sehingga proses pembelajaran kurang optimal karena sarana dan prasarana kurang memadai. Proses pengelolaan sarana dan prasarana masih belum berjalan dengan optimal dimulai dari penginventarisasian, pemakaian pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana (Sinta, 2019).

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat 3 (tiga) pertanyaan penelitian yaitu faktor apa saja yang membuat biaya pendidikan di Indonesia bertambah banyak? Bagaimana optimalisasi dalam hal fasilitas di setiap sekolah? Apakah dana yang dikeluarkan dari pemerintah sudah optimal untuk setiap instansi pendidikan?

METODE

Metode penelitian merupakan cara atau upaya untuk mencari hal sesuatu untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis laporan. Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang disusun secara sistematis dan memiliki tujuan. Oleh karena itu, informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang sejauh mana menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya dalam pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (Muin & Mucharom, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kenaikan pada pendidikan saat ini bisa dikatakan persentase 40-70%, bisa disebutkan faktor yang mendominasi adanya kenaikan biaya pendidikan adalah teknologi yang digunakan yang merupakan fasilitas pendukung sekolah berupa laboratorium komputer, ekstrakurikuler di setiap sekolah yang mana akan senantiasa meningkatkan daya kualitas di bidang prestasi masing-masing murid, ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan belajar praktis dengan tablet android dan kebutuhan dari tingkat guru tetap juga non tetap yang dipekerjakan di sekolah, dan mengembangkan perpustakaan sekolah baik buku-buku literasi, fasilitas yang ada di dalam perpustakaan, biaya pembangunan atau perbaikan gedung, kelas supaya bisa meningkatkan semangat belajar kepada murid sekolah, dan biaya listrik untuk sekolahnya, dan kebutuhan obat atau peralatan kesehatan dalam UKS.

Pembahasan

Kenaikan pada pendidikan saat ini bisa dikatakan persentase 40-70%, bisa disebutkan faktor yang mendominasi adanya kenaikan biaya pendidikan adalah teknologi yang digunakan yang merupakan fasilitas pendukung sekolah berupa laboratorium komputer, ekstrakurikuler di setiap sekolah. Teknologi ini senantiasa meningkatkan daya kualitas dibidang prestasi masing-masing siswa, ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan belajar praktis dengan tablet android dan kebutuhan dari tingkat guru tetap juga non tetap yang dipekerjakan disekolah, dan mengembangkan perpustakaan sekolah baik buku-buku literasi, fasilitas yang ada di dalam perpustakaan, biaya pembangunan atau perbaikan gedung, kelas supaya bisa meningkatkan semangat belajar kepada murid sekolah, dan biaya listrik untuk sekolahnya, dan kebutuhan obat atau peralatan kesehatan dalam UKS.

Adapun beberapa faktor berupa intern ini menggambarkan berasal dari suatu sistem tersendiri yang mana sangat banyak berpengaruh sangat mendominasi pendidikan negara. Faktor ini meliputi sasaran pendidikan (misalnya, sasaran pengaruh tingkat dominan pembayaran pendidikan adalah sasaran kelembagaan lembaga pendidikan. Mengubah sasaran pendidikan dalam mengendalikan sepuluh terampil berbeda dengan sasaran yang pengaruhnya jumlah pembayaran hendak dibayarkan), penghampiran yang dipakai (program dari KBM membutuhkan

praktik lokakarya dan lab membutuhkan sangat banyak pengeluaran berbeda dengan kaidah lain dan pendekatan penghampiran berupa perseorangan. Pentingnya penyediaan tersebut memudahkan dalam proses belajar mengajar, bimbingan konseling dengan hasil yang baik (Prastyawan, 2016). Apalagi di zaman digital seperti ini, banyak yang memakai teknologi. Oleh karena itu patut jika dibuat lab akan menjadi lebih baik.

Ajaran pembelajaran berupaya diselenggarakan praktik lapangan lebih diberikan banyak pengeluaran disandingkan dengan pembelajaran berupa teori yang mana diselenggarakan dengan pemaparan sebuah ilmu. Untuk memberikan pelajaran yang akan diberikan membutuhkan salah satu komponen yaitu kurikulum, di mana merupakan sarana yang harus ada di sekolah. Untuk melaksanakan kurikulum pun harus ada sarana dan prasarana yang memadai, baik secara langsung maupun langsung (Huda, 2018). Aspek pengaruh kepada pengeluaran uang tingkat pendidikan adalah tingkat dan jenis pendidikan. Adanya mempertimbangkan panjangnya waktu pembelajaran, terlalu beragamnya mengupayakan memenuhi bahan ajaran berdampak besar pada lulusnya murid. Keberhasilan pembelajaran di sekolah itu adanya dukungan pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada secara efektif dan efisien (Westri, 1389).

Urgensinya menyiapkan rencana administrasi uang untuk membiayai pendidikan anak diberikan biaya bertahun-tahun untuk terus meningkat, peningkatan biaya hidup dari tahun ke tahun, keadaan perekonomian tidak selalu baik, fisik manusia tidak selalu akan sehat dan banyak alternatif produk keuangan adalah mengapa keluarga perlu mempersiapkan rencana biaya dana pendidikan anak. Adapun kesalahan sudah terjadi terkait kesiapan dana pendidikan berupa, belum bisa memperkirakan total keseluruhan pembayaran pendidikan untuk murid ke depannya dan tidak menjamin tabungan sangat terjamin (Rita Rio & Santoso, 2015).

Bagi instansi pendidikan diimbau membuat RKAS sesuai peraturan yang diatur dalam Pasal 53 PP No. 19-2005 berisi Standar Nasional Pendidikan, merupakan Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) teruntuk waktu kerja satu tahun. Rencana ini adalah tatanan pendapatan biaya sekolah dari banyak sumber penghasilan juga aturan proker tahun berupa terbagi banyak jumlah aktivitas biasa juga sedemikian rupa kegiatan lainnya ditambahi penjabaran detail wacana tentang biaya dalam 1 tahun pengeluaran biaya (Dwi Angraini, n.d.).

Kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan terutama dalam sarana prasarana, seperti yang terjadi di sekolah-sekolah yang berada di pelosok negeri ini dari papan tulis yang mulai rontok akibat sering terkena rembesan air dari atap yang bocor, meja dan kursi yang minim di ruangan kelas. Dalam hal ini kegiatan belajar mengajar menjadi tidak kondusif dikarenakan kondisi sarana dalam pembelajaran jauh dari kata layak. Seseorang akan memperoleh pendidikan jika layak, baik dan yang pasti sekolah harus memperhatikan banyak hal di setiap sisinya, baik manajemennya, sarana dan prasarananya, maupun sistem pembelajarannya (Trisnawati et al., 2017).

Pada kenyataannya wilayah pelosok tidak melengkapinya tentang pembangunan, termasuk sumber daya manusia sendiri untuk mengaktifkan pengembangan pendidikan, perihal ini kebanyakan masalah muncul mengenai kurangnya fasilitas dan infrastruktur, semacam kebutuhan minimum yang ada di masalah utama dalam pendidikan sekolah di Indonesia, terkhususnya di daerah pelosok jauh dari kota. Setiap pendidikan harus memiliki fasilitas seperti alat perabotan pengajaran pendidikan, media pendidikan, literasi dan akar pembelajaran yang dapat mendukung pemrosesan belajar beraturan dan efisien. Jika perlengkapan fasilitas seperti yang dijelaskan atas sudah tercukupi dan dikelola dengan baik dan benar maka, infrastruktur akan berjalan secara optimal.

Hal ini bisa terjadi karena kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia dan faktor diskriminasi yang mempengaruhi ketidakmerataan pendidikan. Padahal adanya sarana dan prasarana merupakan sarana penunjang tercapainya suatu tujuan pendidikan (Huda, 2018).

Peneliti berkeyakinan bahwa pemerintah harusnya mengembangkan nilai kalkulasi keuangan pendidikan lalu mencakup keuangan pendidikan untuk masyarakat jika ada yang kekurangan dalam biaya pendidikan, dari sekolah swasta hingga negeri. Negara wajib memantau fasilitas dan infrastruktur di setiap daerah, apakah sangat kurang atau rusak. Negara demikian seharusnya menjembatani dan memberikan kesempatan untuk membantu tentang pendidikan untuk warganya kiranya belum bisa mendapatkannya, serta cara yang bisa disegerakan, yaitu memprioritaskan pendidikan dasar dengan lamanya sembilan tahun, memberikan beasiswa arahan

LITERATUS is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to social impact and cultural studies. It is hoped that LITERATUS can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

Our focus:
Social and Culture

Our Scope:
Humanities, Education, Management, History, Economics, Linguistics, Literature, Religion, Politics, Sociology, Anthropology, and others.



yang cermat, memberikan motivasi atau dorongan untuk setiap tenaga pengajar mempunyai tugas untuk mengajar di daerah pelosok, mengintegrasikan aturan pendidikan terpadu bagi siswa yang membutuhkan ajaran khusus, dan meningkatkan turut serta warga negara dengan adanya dukungan memiliki didikan murid yang baik.

Upaya yang bisa dilakukan yaitu seperti sekolah pandai-pandai mengolah dana dan juga harus meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Jika ada kekurangan, guru juga meningkatkan kreativitasnya untuk mengajar dengan alat seadanya. Untuk orang tua mungkin bisa memberikan sumbangan-sumbangan yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah dengan membayar SPP dan komite dengan tepat waktu. Lembaga pendidikan di setiap daerah harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki lagi.

Keadaan hingga saat ini, pada tupoksinya pemerintah sekadar mengefisienkan pendidikan di kota dan menelantarkan pendidikan di pelosok. Pada akhirnya, daerah pelosok bermasalah adanya kekurangan fasilitas dan infrastruktur di bidang pendidikan menimbulkan, misalnya guru yang mendominasi di kota sementara di pelosok, yang minimal untuk kekuatan pendidikan. Upaya ini harus dilaksanakan dengan benar dan terprogres untuk distribusi sarana dan prasarana di sekolah akan sepenuhnya.

Instansi pendidikan adalah institusi bagian sistem sosial negara yang memiliki tujuan membuat pribadi manusia yang cerdas, ulet, pandai, memiliki kualitas baik fisik dan spiritual, dan mempunyai literasi yang terampil, juga kepribadian yang stabil. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan proses ajaran yang kuat melalui revolusi pendidikan dari pemerintah dan Kemendikbud. Skema ke depannya akan dipergunakan landasan pelaksanaan semua aktivitas pembelajaran, terutama komunikasi antara guru dan siswa dalam proses KBM. Pengajar sebagai seorang pengajar diharuskan mengatur metode belajar yang bagus dan bermakna sehingga hasil yang dicapai dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pembelajaran memiliki karakteristik beda dan penyampaian berbeda. Oleh karena itu, setiap materi ajaran juga memerlukan fasilitas KBM yang juga berbeda. Ketika melakukan proses belajar, guru tentu memerlukan media yang dapat mendukung kinerjanya, lantas KBM bisa berlangsung memikat dan menyenangkan murid. seraya adanya fasilitas belajar mendukung, pengajar tidak selalu memberikan materi secara oral, tetapi juga dengan cara menulis dan mencontohkan sesuai dengan infrastruktur dipersiapkan oleh pengajar.

Urgensinya fasilitas di kegiatan belajar mengajar, siswa, tenaga pengajar dan sekolah langsung terhubung. Siswa lumayan membantu untuk mendukung fasilitas pembelajaran. Tidak seluruhnya siswa memiliki kecermatan dengan baik, lantas kegunaan fasilitas pembelajaran menolong siswa, terutama mereka mempunyai kekurangan dalam ikut belajar serta dalam kegiatan belajar. Untuk guru akan dibantu dengan mendukung fasilitas infrastruktur. Kegiatan belajar juga bisa dikatakan sangat bervariasi, memikat dan tenang. Sementara sekolah diperlukan untuk menjadi bagian yang paling mengemban amanah untuk mengelola semua aktivitas sekolah yang diadakan. Di sisi lain, sekolah harus menjaga dan merawat fasilitas yang telah dimiliki (Rahmiga, 2014).

Kewajiban untuk mendapat hak pendidikan telah tercantum di UU No 20-2003, yang intinya semua orang mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan sekalipun dalam Negara itu memiliki warga Negara yang cacat fisik, emosional, dan mental juga harus mendapatkan pendidikan tetapi pendidikan khusus sekalipun dengan warga Negara yang berada di daerah terpencil harus mendapat akses pendidikan pula. Kalau berbicara tentang pendidikan terjadi bentangan antara peningkatan dan pemerataan, di mana pemerintah wajib menjamin dua hal tersebut, oleh karena itu pemerintah mencari cara untuk menemukan jalan keluar sebagai melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu melakukan upaya peningkatan pendidikan melalui dukungan uang. Agar pendidikan berkualitas cara yang ditempuh adalah salah satunya peningkatan proses pembelajaran, yang meliputi di kelas di mana harus ada biaya yang tinggi juga yang diatur. Penghitungan dana pendidikan harus dihitung secara akurat sesuai komponen kegiatan dan biaya satuan. Jika dilakukan maka akan ada analisis tentang semua penggunaan biaya dan itu tidak bisa ditinggalkan dalam konstitusi disebutkan bahwa kewajiban pemerintah adalah membiayai pendidikan warga negaranya, oleh karena itu secara sepakat maka dana untuk biaya pendidikan yang dari pemerintah dan signifikan dinamakan BOS dan sumbernya dari

APBN (Fauzan, 2014). Oleh karena itu, pada 2005 dikeluarkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sasaran BOS ini untuk semua sekolah entah swasta maupun negeri yang sudah terdata dalam sistem dana pokok pendidikan (Oktaviasari et al., 2018). Untuk memulai anggaran tersebut dilakukan beberapa hal dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan pendidikan, pengawasan anggaran pendidikan, agar dana BOS tersebut berhasil maka caranya dengan pengelolaan dana dan segala sumbernya yang di program BOS. BOS dikelola oleh tim pusat provinsi dan kabupaten/kota agar pelaksanaan BOS sesuai dengan aturan. Pengelolaan dana BOS ini penting karena pengelolaan yang baik akan mencapai tujuan, yaitu efisien dan efektif. Sekolah yang mengelola program BOS yang baik artinya sekolah tersebut berhasil yaitu melalui proses kerja sama dimulai dari perencanaan pelaksanaan sampai evaluasi secara sistematis (Fitri, 2014).

Dalam menyusun anggaran pendidikan harus menggunakan prinsip dan tujuannya sebagai alat pengendalian maupun perencanaan, prinsip-prinsipnya yaitu (Fattah, 2006):

1. Terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab pada sistem manajemen dan organisasi pendidikan.
2. Anggaran pendidikan dilaksanakan dengan adanya sistem pembukuan (akuntansi) yang memadai.
3. Adanya penelitian dan menganalisis hasil kinerja dari organisasi pendidikan.
4. Terdapat dukungan pelaksana dari atas sampai bawah (akhir).

Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari informan menyebutkan bahwa optimalnya pengeluaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah tergantung jumlah siswanya, misalnya ada suatu sekolah SD siswanya banyak, maka biaya operasional yang dikeluarkan sekolah tersebut juga banyak. Seperti yang dijelaskan dari penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa ketika pemerintah mengeluarkan dana pendidikan maka memang harus membutuhkan perencanaan dulu dan perlu melihat kondisi sekolah tersebut. Anggaran biaya pendidikan terdiri dari sisi anggaran penerimaan dan sisi anggaran pengeluaran supaya tujuan pendidikan ketika pengelolaan tercapai dan dua sisi tersebut berkaitan satu dengan lain. Melakukan pengelolaan akan diawali dengan namanya perencanaan begitu pula dengan pendidikan dikaitkan dengan penganggaran untuk menyusun anggaran yang tepat, di Indonesia menggunakan sistem yang dikenal sebagai SIPPA yang kepanjangannya adalah sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Untuk melaksanakan SIPPA ini langkah-langkahnya:

1. Ada perumusan tentang kebijakan program berdasar pada rencana umum yang ada.
2. Setelah dirumuskan kebijakan program itu, maka diuraikan dengan menyusun alternatifnya.
3. Pilih program yang dengan pertimbangan tujuan program, alternatif dan pembiayaan.
4. Merumuskan program yang sudah dipilih kemudian dengan merujuk tujuan alternatif dan biaya yang terkait dengan dimensi waktu.

Proses perencanaan diawali penyusunan RAKS yang dilakukan oleh tim manajemen BOS sekolah, guru dan komite sekolah. Penyusunan RAKS langkah-langkahnya diawali identifikasi kebutuhan sekolah dalam setahun. Selanjutnya setelah itu dibuatnya perencanaan untuk anggaran, lalu setelah itu tim akan sosialisasi kepada kepala sekolah, guru dan komite sekolah untuk membicarakan perencanaan itu (Subkhi Widyatmoko, 2017).

RAKS harus dapat menunjukkan nama kegiatan yang akan dibiayai, tujuan kegiatan dan sumber biayanya. Selain itu menyertakan siapa yang akan bertanggung jawab atas kegiatan itu dan kapan dilaksanakan. Dengan memasukkan rincian kegiatan pendanaan itu, kita dapat mengetahui mana yang prioritas anggaran sekolah. Sebuah sekolah dapat dikatakan mendukung peningkatan kualitas atau tidak, kita dapat melihat dari beberapa (persentase) anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas seperti: membeli buku, membina siswa, melengkapi peralatan mengajar dan sejenisnya.

Selain itu juga dibentuk RAPBS dalam menggunakan dana BOS. RAPBS adalah rencana akuisisi pembiayaan pendidikan yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan dan komposisi program-program kerja tahunan yang di mana terdiri dari sejumlah kegiatan rutin yang dilakukan, serta beberapa kegiatan yang lain disertai juga rencana untuk pembiayaan dalam satu tahun fiskal. Oleh karenanya berisi berbagai sumber pendapatan dan keseluruhan nominal, baik yang sudah jadi kebiasaan (rutin) dan pengembangan, kisaran pengeluaran, dan jumlah nominal dalam satu tahun anggaran. Dalam mengalokasikan dana hal yang diperhatikan yaitu komponen guru, siswa dan ruang belajar. Penyaluran dana BOS dilaksanakan setiap triwulan. Pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara BOS, tetapi jika bendahara tidak dapat hadir salah



satunya dengan cara surat rekomendasi dari bank dan dana BOS diterima tanpa pungutan apa pun (Muryati, 2016).

Penatausahaan keuangan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat transaksi masuk keluarnya uang yang sudah digunakan guna membiayai program pendidikan dengan tujuan memperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran pendidikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kegiatan ini perlu dipertimbangkan dengan baik, dikarenakan kegiatan ini sangat berguna dalam konteks pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengguna anggaran pendidikan. Paling tidak ada dua hal penting yang ada pada administrasi anggaran pendidikan yang harus dilakukan di antaranya pengumpulan data dan pelaporan keuangan pendidikan serta dibentuk pembukuan untuk implementasi anggaran pendidikan.

Kegiatan pengumpulan data ini termasuk identifikasi dan pengukuran data keuangan, catatan dan klasifikasi data keuangan, dan dilakukan pelaporan keuangan kepada pengguna. Yang dikerjakan di pembukuan dana BOS itu adalah buku kas umum, pembantu kas, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank. Sekolah yang telah menerima dana BOS wajib melaporkan/membuat laporan tentang seberapa banyak dana BOS yang sudah digunakan, misalnya sekolah memakai dana BOS untuk kegiatan-kegiatan tertentu oleh karenanya dituntut juga melampirkan juga laporan pertanggungjawaban yang berisi mengenai dana-dana kegiatan itu (Sumarni, 2015). Ketika melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana itu dilakukan dengan memeriksa validitas bukti pengeluaran, sistematika validitas terdiri nama, agensi, nama yang menerima pembayaran, deskripsi pembiayaan, total uang yang dibayarkan, tahun anggaran dan garis anggaran, meterai. Masih banyak hal yang terkait dengan akuntabilitas keuangan pendidikan, menurut peneliti ini penting jika tidak ada laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan keuangan, kemungkinan ada penyimpangan terhadap uang yang digunakan tersebut. Setiap kepala sekolah ditugaskan untuk menyerahkan laporan ke sektor keuangan, terutama menyerahkan tentang penerimaan dan pengeluaran uang sekolah. Evaluasi mengenai penggunaan uang tersebut selalu diadakan setiap triwulan atau per semester. Evaluasinya mengenai tentang dana yang digunakan dilakukan dengan cara diperhitungkan oleh sumber dana. Jika dana tersebut ada yang dari orang tua siswa maka kepala sekolah kepada orang tua siswa itu. Sama juga jika dana itu didapatkan dari pemerintah, maka mereka bertanggung jawab ke pemerintah.

Pengawasan dana adalah tindakan yang bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan uang dan pengelolaan anggaran yang diajukan oleh sekolah. Pengawasan ini dilakukan oleh para pihak seperti yang tercantum di Pasal 199 PP No 7-2010 di mana terdiri dari tiga pihak yaitu pemerintah daerah dan dewan pendidikan. dalam melaksanakan dana tersebut perlu dilakukan oleh pengawasan dana, pengawasan tersebut dengan tujuan untuk mengantisipasi dilakukannya hal-hal lain yang menggunakan dana tersebut hasil wawancara yang dilakukan kepada informan menyebutkan bahwa pengawasan dana di instansi pendidikan tertata rapi dan detail (Michael, 2017). Jika dikaitkan dengan asas *good governance* (asas umum pemerintahan baik), pengawasan yang dilakukan dengan baik merupakan salah satu pelaksanaan asas tersebut, yang maknanya syarat pemerintah yang baik adalah salah satunya dilakukan kegiatan tadi (Michael, 2016). Pengawasan yang baik akan menghasilkan pemerintahan yang baik pula dan ketika pemerintahan itu sudah baik maka sudah bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Michael, 2019). Sistem pengawasan yang efektif harus menitikberatkan dan memfokuskan apa yang harus dikerjakan, pokok perhatian ada pada kegiatan yang penting bagi tercapainya tujuan.

Di dunia pendidikan mengenal pengawasan yang dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal yaitu ditugaskan kepada kepala sekolah dan pihak komite sekolah, biasanya komite sekolah ini berisikan tokoh-tokoh masyarakat yang biasanya orang tua/wali yang peduli pendidikan. sifat dari komite sekolah ini berdiri sendiri (independen) yang bertugas untuk mengawasi jalannya program-program yang diberikan dari sekolah dan pelaksanaan untuk peningkatan kualitas belajar mengajar sesuai di RAPBS. Sedangkan pengawasan eksternal ini dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah yaitu inspektorat dan dinas pendidikan. Ketika sedang proses perencanaan dana BOS, pihak-pihak penting yang terlibat adalah kepala sekolah, bendahara, sebagian dewan, guru dan komite sekolah.

Akan tetapi walaupun menurut informan pengeluaran dana yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup optimal, karena perlu melihat kondisi sekolah dulu dan tergantung dari siswanya. Menurut peneliti pun perlu pengawasan terhadap dana tersebut, karena sudah dikatakan

di awal dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan dana tersebut. Disadari atau tidak konstitusi dalam hal ini menjadi harapan bagi bangsa-bangsa terhadap kemajuan bangsa ini, di konstitusi Pasal 31 (2) UUD NRI 1945 yang merupakan perubahan ketiga dan Pasal 31 ayat (4) merupakan perubahan keempat. Rumusan amandemen tersebut intinya secara implisit untuk mengundang/menyuruh/ mengajak pemerintah agar lebih memperhatikan pembangunan di sektor pendidikan, karena pembangunan di sektor pendidikan perlu diperhatikan dan mengingat di pembukaan konstitusi Negara kita tertulis fungsi Negara salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi agar Negara itu maju maka perlu juga adanya sumber daya manusia yang maju, agar warga-warga Negara bisa menjadi untuk mencapai kemakmuran maka salah satunya dengan adanya pendidikan (Michael, 2016).

PENUTUP

Dalam konstitusi disebutkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah membiayai pendidikan warga negaranya. Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dana BOS. Untuk memulai anggaran tersebut dilakukan beberapa hal dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan pendidikan, pengawasan anggaran pendidikan. Adanya BOS membantu terselenggaranya belajar selama 9 tahun, oleh karena itu juga dibentuklah peraturan menteri pendidikan yang sekarang memakai Peraturan Menteri Pendidikan No 1-2018, dalam peraturan itu disebutkan tujuan adanya BOS adalah untuk meringankan masyarakat terkait beban pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan operasional sekolah. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik*.
- Atmaja, T. E. R., Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2016). Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*.
- Azzahra, N. F. (2020). Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Center for Indonesians Policy Studies*.
- Barlian, U. C. (2016). Kebijakan Pengelolaan Dana Pendidikan Tingkat Sekolah Dalam Konteks Otonomi Daerah. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 69–86. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v3i2.18>
- Dwi Anggraini, R. (n.d.). *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. 1 nomor 2, 07*.
- Fattah, N. (2006). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Cetakan ke). PT Remaja Rosdakarya.
- Fauzan, F. (2014). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 10(3), 158. <https://doi.org/10.21067/jem.v10i3.776>
- Fitri, A. (2014). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 33–39.
- Huda, M. N. (2018). Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. *Ta'dibi*, VI, 51–69.
- Maralih. (2014). Peranan Supervisi Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Qathruna*.
- Michael, T. (2016). Corruption And Niccolo Machiavell. *Asia Pacific Fraud Journal*. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.21>
- Michael, T. (2017). Right To Have Rights. *Mimbar Keadilan*, 106. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2203>
- Michael, T. (2019). Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 211.
- Muin, F., & Mucharom, R. S. (2016). Desa dan hukum adat : persepektif normativitas dan sosiologis keindonesiaan. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Paper UNISBANK KE-2*.

LITERATUS is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in the form of conceptual paper and field research related to social impact and cultural studies. It is hoped that LITERATUS can become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the development of science and knowledge.

Our focus:
Social and Culture

Our Scope:
Humanities, Education, Management, History, Economics, Linguistics, Literature, Religion, Politics, Sociology, Anthropology, and others.





- Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana Bos pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 237. <https://doi.org/10.21831/amp.v4i2.10802>
- Novitasari, I. (2020). Selebgram Dikenakan Pajak? *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3078>
- Oktaviasari, S. W., Hadiyanto, & Santoso, Y. (2018). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional*.
- Prastyawan. (2016). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan. *Al-Hikmah*, 6(1), 35.
- Rita Rio, M., & Santoso, B. (2015). No Title. *Literasi Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Pada Dana Pendidikan Anak*, 10, 04.
- Sinta, I. M. (2019). Manajemen Sarana Dan Prasarana. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*. <https://doi.org/10.15575/isema.v4i1.5645>
- Subkhi Widyatmoko, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sd N Kemas I Surakarta. *Managemen Pendidikan*, 12(1), 153–160.
- Sumarni, N. (2015). *Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) di smpn 6 satap rambah samo*.
- Trisnawati, Zahri Harun, C., & Usman, N. (2017). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sd Negeri Lamteubee Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah*, 7(1), 62–69.
- Westri, Z. (1989). *Pengaruh Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Terhadap Efektivitas Penunjang Pembelajaran Siswa*. Universitas Negeri Padang, 17022043.